

**PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA
DI WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA
INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE
(Studi Kasus di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur)**

Oleh : Prof. Dr. H. Sapriya.,M.Ed & Rahman Mulyawan, Drs.,M.Si

Abstrak

Dari sudut pandang integrasi bangsa, peran pembangunan karakter bangsa memiliki kedudukan yang strategis dalam pembentukan sikap moral atau watak bangsa. Hal ini akan semakin strategis apabila pelaksanaannya dilakukan di wilayah perbatasan antar negara seperti di Kabupaten Belu yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Namun upaya pembentukan watak dan sikap moral bangsa ini dapat dikatakan masih menemukan hambatan atau kendala, hal ini disebabkan oleh banyak faktor.

Bahwasanya integrasi bangsa dalam konteks pembangunan karakter bangsa adalah penyatuan dari seluruh dan berbagai macam bentuk sosial budaya yang ada di Indonesia dalam rangka menentukan identitas nasional. Identitas nasional yang dimaksud adalah sikap moral dan watak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat integrasi bangsa dan mencegah disintegrasi bangsa peranan pembangunan karakter bangsa sangat penting karena banyak memberi kontribusi terhadap pembentukan watak dan sikap moral bangsa sebagai identitas nasional.

PENDAHULUAN

Pengembangan kawasan perbatasan memerlukan suatu langkah strategis dan komprehensif. Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini telah mengakibatkan

timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial.

Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi '*inward looking*' sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pengembangan wilayah-wilayah perbatasan harus mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Daerah Perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Daerah perbatasan sangat rawan akan persembunyian kelompok Gerakan Pengacau Keamanan, penyelundupan dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama yang terpadu antar instansi terkait dalam penanganannya.

Sebagai negara kepulauan (*Archipelagic state*), Republik Indonesia mempunyai batas maritim berupa batas laut wilayah (teritorial), batas landas

kontinen dan batas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan 10 (sepuluh) negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Republik Demokratik Timor Leste dan Australia. Pada kawasan perbatasan laut (maritim) pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan Indonesia ada tiga negara, yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Salah satu wilayah kabupaten yang ada di Indonesia dan berbatasan langsung dengan wilayah daratan Timor Leste adalah Kabupaten Belu di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Tingkat pendidikan dan daya beli masyarakat Kabupaten Belu pada umumnya masih sangat rendah. Kondisi ini sangat rawan untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau kekuatan asing yang mempunyai tujuan untuk mengganggu stabilitas dan keamanan di wilayah Kabupaten Belu pada khususnya. Selain itu kondisi inipun sangat mudah dikuasai oleh arus kontaminasi budaya liberal yang kehadirannya sangat diterima secara terbuka oleh masyarakat setempat.

Beberapa permasalahan di atas telah menjadikan sebagian masyarakat Kabupaten Belu mulai terkikis dan melupakan rasa nasionalisme mereka serta beralih untuk mengadopsi ideologi lain guna menggantikan Pancasila. Masyarakat di kawasan perbatasan apabila tidak dibina rasa nasionalisme mereka, lambat laun akan melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia.

PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

Upaya membangun karakter warga negara pada dasarnya adalah proses pewarisan nilai-nilai, cita-cita, dan tujuan nasional yang tertera

dalam konstitusi negara serta pesan para pendiri negara (*the founding fathers*). Tujuannya, sebagaimana pesan UUD 1945, adalah untuk mewujudkan warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai kebesaran dan kejayaan dalam suasana kemerdekaan.

Setiap bangsa dan negara mengakui pentingnya pembangunan karakter bangsa (*National Character Building*) dalam rangka memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai suatu negara-bangsa (*nation-state*). Di Indonesia, upaya pembangunan karakter bangsa ini telah menjadi masalah serius sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia karena suatu kenyataan bahwa kondisi bangsa Indonesia saat itu menghadapi masalah multi dimensi (ekonomi, politik, budaya, hankam, ideologi, dsb). Solusi dalam menghadapi masalah di atas menurut Feith (1962:27-28) adalah dengan memperkuat rasa kebangsaan bagi seluruh warga Negara Indonesia (*Indonesian Nasionalism*).

Pembangunan karakter bangsa melibatkan berbagai komponen bangsa, baik pada tataran supra maupun infrastruktur politik, teoritis maupun praktisi, berbagai komponen pendidikan pada seluruh jenjang dan jenis, serta partisipasi seluruh warga negara-bangsa. Dari seluruh komponen berpengaruh tersebut, komponen pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis. Pendidikan sebagai wahana transformasi budaya, nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bahkan seni telah menjadi pusat untuk pembangunan karakter bangsa baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Sejumlah bahan kajian dan mata pelajaran pun telah ditawarkan, baik yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah untuk jangka waktu tertentu maupun berdasarkan pada tuntutan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.

Tujuan utama dari pembangunan karakter bangsa adalah untuk menumbuhkan karakter warga Negara baik karakter privat seperti

tanggung jawab moral, disiplin diri dan pengetahuan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu; maupun karakter publik, misalnya kepedulian sebagai warga Negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi (Winataputra dan Budimansyah, 2007:192)

Berkaitan dengan uraian pembangunan karakter bangsa seperti tersebut di atas, hal tersebut sangat sesuai dengan isi UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 yang memposisikan pendidikan karakter sebagai misi pertama dari delapan misi guna mewujudkan visi pembangunan nasional yang bertujuan untuk terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotongroyong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan berorientasi ipteks.

Proses pendidikan demokrasi yang sangat strategis, khususnya untuk generasi mendatang adalah melalui proses pembangunan karakter bangsa di lingkungan masyarakat sekolah (*school civic education*). Memperhatikan masalah yang dihadapi baik pada tataran teoritis maupun aplikatif sebagaimana diuraikan di atas, sudah selayaknya apabila pengorganisasian dan penyajian materi pembangunan karakter bangsa hendaknya secara psikologis dan ilmiah di dalam kelas sebagai "laboratorium demokrasi" untuk menumbuhkan "*creative dialogue*", sebagai ciri masyarakat demokrasi. Meskipun demikian, kondisi iklim (*climate, atmosphere*) sekolah tidak luput pula dari sejumlah tantangan, antara lain: *pertama*, tantangan budaya sekolah di Indonesia yang menunjukkan ciri/sifat lebih birokratis daripada demokratis; *kedua*, pengorganisasian kurikulum sekolah di Indonesia lebih

bersifat sentralistis yang berdampak pada pengelolaan kelas oleh narasumber dan kepemimpinan sekolah yang bersifat "*imperative dialogue*"; dan ketiga, kondisi lingkungan masyarakat yang paternalistis. Kondisi ini tentunya tidak kondusif untuk membangun iklim sekolah dan masyarakat dalam mempersiapkan dan membentuk warga Negara yang demokratis.

Lebih lanjut Kementerian Pendidikan Nasional dalam **Disain Induk Pendidikan Karakter** (2010:10) mengemukakan bahwa konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial kultural dapat dikelompokkan menjadi : **Olah Hati** (*Spiritual and Emotional Development*) yang bertujuan menghasilkan sikap jujur dan bertanggung jawab, **Olah Pikir** (*Intellectual Development*) yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, **Olah Raga dan Kinestetik** (*Physical and Kinesthetic Development*) yang bertujuan meningkatkan kualitas kebersihan dan kesehatan, dan **Olah Rasa dan Karsa** (*Affective and Creativity Development*) yang bertujuan untuk meningkatkan sikap peduli dan kreatif. Perpaduan dari 4 (empat) aspek diatas akan menghasilkan nilai-nilai luhur dan perilaku berkarakter. Dengan kata lain, karakter dapat kita maknai sebagai kualitas pribadi yang baik, dalam arti tahu kebaikan, mau berbuat baik dan nyata berperilaku baik, yang secara koheren memancar sebagai hasil dari olah pikir, olah hati, olah raga dan olah rasa dan karsa. Hal ini sesuai dengan pendapat Lickona (1991:51) yang mengemukakan bahwa karakter yang baik atau *good characters* terdiri atas proses psikologis *knowing the good, desiring the good, and doing the good – habit of the mind, habit of the heart, and habit of action.*

SELINTAS TENTANG KABUPATEN BELU

Kabupaten Belu merupakan kawasan perbatasan antara Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Kabupaten ini memiliki 2 (dua) macam perbatasan utama yaitu perbatasan antar

negara dan perbatasan antar kabupaten. Perbatasan antar negara memiliki nilai strategis terkait dengan kedaulatan negara Indonesia. Sebagai kawasan perbatasan, Kabupaten Belu secara geopolitik menyandang predikat sebagai beranda depan negara di mata internasional. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan semakin penting dan strategis. Komitmen Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional menjadikan kawasan perbatasan sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Perkembangan kawasan perbatasan terkait erat dengan kegiatan pembangunan kawasan, dan juga terkait dengan keberadaan sumber daya alam, sumber daya sosial-ekonomi, dan sumber daya manusia. Sumber daya alam dan sumber daya manusia di kabupaten Belu umumnya tampak belum dapat diunggulkan, sehingga keadaan ekonomi masyarakat umumnya berada pada kondisi yang belum memadai.

Sejak diumumkannya hasil jajak pendapat masyarakat Timor Timur pada tanggal 4 September 1999 disusul dengan kemerdekaan RDTL tahun 2000, maka posisi Kabupaten Belu menjadi sangat penting dan strategis karena menjadi wilayah atau kawasan perbatasan negara. Kawasan perbatasan khususnya kabupaten Belu telah mengalami dua fase "*implementasi politis*" yang disebut sebagai fase tindakan darurat dan fase tindakan peralihan. Sampai dengan saat ini fase tersebut berlanjut dan memasuki fase tindakan pengembangan. Fase tindakan pengembangan menandai upaya percepatan pembangunan melalui perencanaan penataan ruang kawasan perbatasan pada tahun 2002. Hal ini dimaksudkan agar upaya rehabilitasi kawasan melalui pembangunan fisik dapat dilakukan pada ruang yang tepat sesuai dengan potensi, kemampuan lahan, dan kebutuhannya, sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kawasan tersebut.

Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan kabupaten lainnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sifat dan karakteristik yang berbeda ini lebih banyak disebabkan oleh potensi ancaman dan gangguan yang ditimbulkan sebagai konsekuensi menjadi wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, dalam hal ini berbatasan dengan negara Timor Leste. Hal lain yang membedakan dengan wilayah lainnya adalah masih tertinggalnya pembangunan fisik maupun nonfisik di Kabupaten Belu. Permasalahan ini dimungkinkan akan melahirkan bahaya laten yang lambat laun akan mengganggu stabilitas dan keamanan wilayah.

Letak Geografis Dan Batas Administrasi Wilayah Perbatasan

Kabupaten Belu merupakan salah satu dari lima kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terletak di daratan Timor. Posisi geografis Kabupaten Belu berada di bagian paling timur dari daratan Timor dan berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste (RDTL). Dan secara astronomis, Kabupaten Belu terletak pada koordinat $124^{\circ}38'33''$ BT sampai $125^{\circ}11'23''$ BT dan $08^{\circ}56'30''$ sampai $09^{\circ}47'30''$ LS.

Batas-batas geografis Kabupaten Belu di :

Sebelah utara : Selat Ombai.

Sebelah selatan : Laut Timor.

Sebelah timur : Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Sebelah barat : Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Secara administratif, Kabupaten Belu memiliki luas wilayah 2.445,57 km², dengan 17 kecamatan yang terbagi ke dalam 12 kelurahan dan 195

desa (pasca pemekaran). Sedangkan untuk total luas wilayah desa-desa yang berbatasan langsung dengan RDTL (28 desa), luasnya sekitar 489,94 km² atau 20,03% dari luas wilayah Kabupaten Belu.

TABEL 1.1

LUAS WILAYAH KABUPATEN BELU PER KECAMATAN TAHUN 2009

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Lamaknen	183,86	8,21
2	Raihat	75,53	3,37
3	Tasifeto Timur	209,59	9,35
4	Lasiolat	66,95	2,99
5	Kakulukmesak	129,23	5,77
6	Kota Atambua	38,49	1,72
7	Tasifeto Barat	290,74	12,98
8	Malaka Timur	71,00	3,65
9	Raimanuk	129,73	5,79
10	Laenmanen	97,76	4,36
11	Sasitamean	167,75	7,49
12	Kobalima	285,09	12,72
13	Malaka Tengah	156,78	7,00
14	Malaka Barat	71,00	3,17
15	Weliman	68,69	3,07
16	Wewiku	69,42	3,10
17	Rinhat	118,25	5,28
Total		2.445,57	100,00

Sumber : Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2009

Kondisi Sosial Kependudukan

Penduduk Kabupaten Belu merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam 4 sub etnik besar yaitu Ema Tetun, Ema Kemak, Ema Bunak, dan Ema Dawan Manlea. Keempat sub etnik tersebut menempati lokasi dengan karakteristik tertentu sesuai dengan kekhasannya; dan sebagian besar penduduk tersebut adalah beragama Kristen Katolik. Masing-masing etnik

mempunyai perbedaan dan persamaan bahasa dan praktek budaya, namun hal tersebut tetap membuat kerukunan di antaranya tetap berjalan.

Berdasarkan buku *The Way to Happiness of Belu People* yang ditulis oleh Rm. Florens Maxi Un Bria bahwa menurut H.J. Grijzen masyarakat Belu mengenal klasifikasi masyarakat ke dalam tiga (3) golongan, yaitu :

1. Golongan pertama adalah *Dasi*, yakni golongan bangsawan yang menempati lapisan terpusat, dan golongan inilah yang akan memangku jabatan pemerintahan secara turun temurun (pemimpin disebut Loro atau Liurai atau Na'i).
2. Golongan kedua adalah *Renu*, yakni golongan rakyat jelata yang merdeka.
3. Golongan ketiga adalah *Ata* atau *Klason*, yakni golongan hamba sahaya, yang merupakan tawanan perang yang dijadikan budak untuk melayani kebutuhan golongan *Renu* atau *Dasi*.

Namun, selain cara penggolongan tersebut terdapat klasifikasi lain di dalam menggolongkan masyarakat Belu, diantaranya berdasarkan kriteria ekonomis, dan politis (sebagaimana masyarakat Jawa).

Kondisi sosial kependudukan masyarakat Kabupaten Belu ditunjukkan dengan kondisi masih tingginya angka kemiskinan dimana sekitar 80% KK merupakan KK miskin. Selain itu, masih rendahnya pendapatan per kapita penduduk, yaitu sebesar Rp. 1.661.550 (2005). Sedangkan pendapatan per kapita penduduk Provinsi NTT sebesar Rp. 2.078.185 dan nasional sebesar Rp. 5.773.798.

Penduduk dapat dipahami dari dua sisi yaitu sisi kualitas dan kuantitasnya. Dari sisi kualitas, penduduk dapat dinilai dengan memperbandingkannya dengan daerah lain dengan melibatkan informasi kemampuan daya beli, tingkat pendidikan, dan kesehatan melalui

penilaian kinerja indeks pembangunan masyarakat (IPM) daerah tersebut. Dari sisi kuantitas, penduduk akan sangat mempengaruhi struktur piramida penduduk, kebutuhan sarana dan prasarana, dan kebutuhan dan ketersediaan lapangan kerja. Kedua sisi tersebut menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dalam upaya menyejahterakan masyarakatnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Belu adalah sebanyak 354.681 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 178.245 jiwa dan perempuan sebanyak 176.436 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Belu selama 15 tahun terakhir rata-rata adalah sebesar 3,36% per tahun. Sedangkan, kepadatan penduduk rata-ratanya adalah 145,03 jiwa/km², dimana Kota Atambua sebagai daerah dengan kepadatan tertinggi (1.180 jiwa/km²) dan Kecamatan Raimanuk sebagai kecamatan dengan kepadatan terendah (73,78 jiwa/km²).

Berdasarkan data pada tahun 2006 dapat diketahui bahwa persentase jumlah penduduk laki-laki adalah sebesar 50,25 % dan penduduk perempuan adalah sebesar 49,75 %. Dengan demikian rasio jenis kelamin (*sex ratio*) dari penduduk Kabupaten Belu adalah sebesar 1,01 yang artinya pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

MODEL PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA DI WILAYAH PERBATASAN

Aspek kehidupan politik termasuk kepada salah satu bagian dalam pemerintahan umum, yang pembiayaannya di Daerah menjadi beban tugas Kepala Daerah, dan hal ini sesuai dengan azas dekonsentrasi yang secara otomatis pembinaan dalam peningkatan kualitas pemberdayaan politik di Kabupaten Belu ini menjadi wewenang dan tanggung jawab

Bupati dimana pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

Melihat kenyataan di atas, dapat diketahui bahwa hal tersebut membawa akibat terhadap pembinaan dan perkembangan serta dinamika kehidupan politik yang harus ditumbuhkan di Kabupaten Belu, disamping harus mengacu kepada terwujudnya stabilitas politik di Kabupaten Belu yang mantap, juga harus mengacu kepada terwujudnya kehidupan politik nasional serta ketahanan nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mantap pula.

Terlebih lagi Kabupaten Belu sebagai salah satu daerah perbatasan yang menjadi tolok ukur atau barometer bagi daerah-daerah perbatasan lainnya, maka upaya pembinaan dan dinamika kehidupan politiknya akan senantiasa membawa pengaruh tersendiri terhadap kehidupan politik nasional.

Pembangunan Karakter Bangsa di Kabupaten Belu melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik selalu berlandaskan kepada UU bidang Politik dengan tujuan mewujudkan sikap, persepsi dan perilaku politik yang hanya bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu pemberdayaan politik di Kabupaten Belu diarahkan kepada dua dimensi pokok, yaitu dimensi budaya atau kultur politik dan dimensi struktur atau lembaga politik. Selain itu kebijaksanaan pemberdayaan politik di Kabupaten Belu juga berpedoman kepada program pembangunan politik di tingkat Nasional. Program pembangunan politik di tingkat Nasional inilah yang kemudian di turunkan menjadi tujuan, arah dan kebijaksanaan pembangunan karakter bangsa di Kabupaten Belu yang isinya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Semakin mantapnya penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi nasional, sehingga Pancasila benar-benar menjadi titik tolak

dan tolok ukur dari sikap dan perilaku masyarakat sehari-hari dan lestari sepanjang masa.

2. Semakin mantapnya kesadaran masyarakat akan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945, sehingga memiliki daya penangkal yang tangguh terhadap setiap ancaman yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
3. Meningkatnya kemampuan aparatur Pemerintah agar terwujud aparatur yang bersih, kuat, berdisiplin dan berwibawa sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
4. Meningkatnya kemampuan lembaga-lembaga penyalur aspirasi masyarakat (infra struktur politik), agar benar-benar peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan mampu menyalurkannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme demokrasi Pancasila.
5. Meningkatnya kehidupan sosial politik yang mantap dan dinamis untuk terlaksananya dan suksesnya setiap kegiatan Pemilihan Umum, Sidang Umum MPR, Pilkada serta kontinuitas pembangunan untuk terciptanya kerangka landasan yang kuat dan untuk mencapai lepas landas menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
6. Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan umat beragama serta semakin tumbuh dan berkembangnya motivasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap setiap aspek pembangunan.
7. Meningkatnya fungsi, pemahaman dan kemampuan pers dan mass media lainnya yang bebas dan bertanggung jawab sebagai sarana pendidikan, penerangan dan sosial kontrol yang efektif berdasarkan demokrasi Pancasila.
8. Meningkatnya kesadaran seluruh lapisan masyarakat dalam memiliki sikap dan kewaspadaan nasional agar peka dan mampu mendeteksi sedini mungkin terhadap usaha-usaha yang bersifat provokasi,

intimidasi, subversi dan lain sebagainya yang dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan nasional baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.

9. Meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya mentaati hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warganegara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

Selanjutnya kebijaksanaan tersebut di atas dijabarkan kedalam pokok-pokok program pembangunan bidang politik di Kabupaten Belu sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Pemahaman, Pengamalan, dan Kerukunan Hidup Umat Beragama

Peningkatan Pembauran Bangsa Bagi Tokoh Masyarakat, Pengurus Lembaga Keagamaan dan Generasi Muda.

2) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Dilaksanakan melalui kegiatan Penunjang Bantuan Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan.

3) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan

(1) Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Perlindungan Masyarakat; (2) Penyiapan Pengerahan dan Pengendalian Anggota Linmas Tingkat Kecamatan dan Desa; (3) Pengembangan Aspek-aspek Pemberdayaan Masyarakat dengan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten; (4) Diseminasi Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat; (5) Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat; (6) Pendataan Pelanggar PERDA; (7) Penyelenggaraan Sidang Yustisi; (8) Penegakan dan Penertiban Terhadap para Pelanggar PERDA; (9) Penertiban PKL; (10) Pembinaan K-3; (11) Lomba Ketertiban Wilayah; (12) Peningkatan Kualitas Sarana Fisik dan Pra Sarana Lingkungan Kecamatan dan

Desa; (13) Peningkatan Pelaksanaan Regulasi di Lingkungan Kecamatan dan Desa.

4) Program Peningkatan Partisipasi Politik

(1) Pelayanan Pemberi Ijin dan Rekomendasi Kegiatan Masyarakat; (2) Penguatan Peran dan Fungsi Ormas, LSM dan Yayasan sebagai Mitra Pemerintah; (3) Sosialisasi Undang-undang Politik, Pilkada dan HAM bagi Masyarakat dan Aparatur; (4) Monitoring Kegiatan Masyarakat yang Berpotensi Konflik dalam Menciptakan Situasi yang Kondusif; (5) Inventarisasi Daftar Ulang Ormas, LSM dan Yayasan (6) Pengendalian Kegiatan Penduduk Warga Negara Asing (WNA); (7) Sosialisasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Wewenang Parpol; (8) Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Politik bagi Masyarakat; (9) Komuniti Intel Daerah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Pemahaman, Pengamalan, dan Kerukunan Hidup Umat Beragama

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan program tersebut adalah : Terselenggaranya pelatihan pembauran bangsa bagi tokoh masyarakat, pengurus lembaga keagamaan dan generasi muda baik WNI maupun WNI Keturunan.

Hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program tersebut adalah: Meningkatnya pemahaman tentang persatuan dan kesatuan bangsa.

2) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan program tersebut adalah : Terselenggaranya bantuan bagi kegiatan kebudayaan dan keagamaan.

Hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program tersebut adalah: Meningkatnya aktivitas kegiatan keagamaan dan lingkungan seni di Kabupaten Belu.

3) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan program tersebut adalah : (1) Terselenggaranya Diklatsar Linmas, TOT Linmas, Pemantapan Bela Negara. (2) Terselenggaranya kesiapan Anggota Hansip/Linmas dalam peringatan Hari Besar Nasional. (3) Terselenggaranya bimbingan teknis pengembangan aspek pemberdayaan masyarakat. (4) Terselenggaranya sosialisasi program pemberdayaan masyarakat bagi aparatur.; (5) Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong masyarakat di seluruh Kecamatan dan Desa. (6) Terlaksananya pendataan terhadap pelanggar PERDA di Kabupaten Belu. (7) Terselenggaranya sidang Yustisi bagi para pelanggar Peraturan Daerah. (8) Terlaksananya operasi penertiban terhadap PKL Pelanggar PERDA dan Pelanggar PERDA lainnya. (9) Terlaksananya operasi PKL dan pelanggar PERDA di seluruh Kecamatan dan Desa; (10) Terselenggaranya Penyuluhan K - 3 di seluruh Kecamatan dan Desa; (11) Terselenggaranya Lomba Ketertiban Wilayah di seluruh Kecamatan dan Desa; (12) Tersalurkannya dana operasional penataan lingkungan fisik pemukiman di seluruh Kecamatan dan Desa.

Hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program tersebut adalah: (1) Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan masyarakat dalam bidang Linmas; (2) Meningkatnya kelancaran peringatan Hari Besar Nasional; (3) Meningkatnya pemahaman aspek pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Desa; (4) Meningkatnya pemahaman tentang program pemberdayaan masyarakat bagi aparatur; (5) Meningkatnya peran aktif Swadaya Gotong Royong Masyarakat; (6) Meningkatnya akurasi data para pelanggar Perda di Kabupaten Belu; (7) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah; (8) Meningkatnya kepatuhan masyarakat

terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; (9) Berkurangnya pelanggar Peraturan Daerah di seluruh Kecamatan dan Desa; (10) Berkurangnya pelanggar Peraturan Daerah di seluruh Kecamatan dan Desa; (11) Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah; (12) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kompetisi bidang ketertiban.

4) Program Peningkatan Partisipasi Politik

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan program tersebut adalah : (1) Terlaksananya administrasi ijin kegiatan masyarakat di seluruh Kecamatan dan Desa; (2) Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan keormasan kepada perwakilan Ormas, LSM dan Yayasan; (3) Terselenggaranya sosialisasi UU Politik, Pilkada dan HAM bagi masyarakat dan Aparatur. (4) Terselenggaranya pendeteksian dini situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat pada aparat Kesbang dan Linmas di seluruh Kecamatan dan Desa; (5) Terinventarisasinya data Ormas, LSM dan Yayasan di Kabupaten Belu; (6) Tersusunnya data penduduk WNA; (7) Terselenggaranya Sosialisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang parpol. (8) Terselenggaranya sosialisasi tentang kesadaran berpolitik bagi masyarakat. (9) Tersedianya data intelijen mengenai situasi wilayah di seluruh Kecamatan dan Desa.

Hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program tersebut adalah: (1) Meningkatnya ketertiban administrasi kegiatan masyarakat; (2) Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan keormasan; (3) Meningkatnya pemahaman berpolitik masyarakat dan aparatur; (4) Terkendalinya kegiatan masyarakat yang berpotensi konflik; (5) Meningkatnya kemitraan antara Ormas, LSM dan Yayasan dengan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kabupaten Belu; (6) Meningkatnya akurasi data penduduk WNA di

Kabupaten Belu; (7) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang parpol; (8) Meningkatnya pengetahuan kesadaran berpolitik bagi masyarakat; (9) Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan intelegen daerah.

Pola dan jenis pembinaan lainnya dalam rangka pembangunan *national character building* masyarakat di kawasan perbatasan selain yang telah dijelaskan di atas, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pelatihan Pemantapan Bela Negara
- b. Pelatihan Kewaspadaan Nasional
- c. Sosialisasi UU Politik dan HAM
- d. Pelatihan Monitoring Kegiatan Masyarakat Yang Berpotensi Konflik
- e. Inventarisasi Daftar Ulang Ormas, LSM dan Yayasan
- f. Pengendalian Kegiatan Penduduk Warga Negara Asing
- g. Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang Partai Politik
- h. Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Politik bagi Masyarakat
- i. Kegiatan Komuniti Intel Daerah
- j. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Kerukunan Hidup Umat Beragama
- k. Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Perlindungan Masyarakat
- l. Penegakan dan Penertiban Terhadap Pelanggar Perda
- m. Lomba Ketertiban dan Keamanan Wilayah
- n. Pemantapan Fungsi Linmas dalam rangka Pelaksanaan Kamtibmas
- o. Sosialisasi Pemantapan dan Pembinaan Konsep Benua Maritim Indonesia (BMI), dsb.

PENUTUP

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri terdapat indikasi hampir sebagian besar di setiap lapisan masyarakat di dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi degradasi nilai-nilai juang, patriotisme, dan nasionalisme. Bahkan ada kecendrungan fenomena yang terjadi nampak lebih kearah skeptisme. Sedangkan dalam kehidupan politik di Kabupaten Belu relatif baik walaupun masih adanya jumlah pelanggaran perda yang dilakukan masyarakat.

Upaya yang dilakukan ke depan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah perlu adanya kualitas Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) baik pada tingkat pendidikan formal maupun informal. Sedangkan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan politik perlu terus ditingkatkan bobot pendidikan politik (melek hukum, melek hak dan kewenangan serta melek kewajiban) melalui sosialisasi kepada seluruh komponen warga masyarakat.

-0-

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, Dasim. (2008). “*Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen)*”, *Jurnal Acta Civica*, Vol.1 No.2, hlm.179-198
- Emanuel, Ulu, 2007. *Model Perencanaan Strategik Pendidikan untuk Wilayah Lintas Perbatasan (Disertasi)*, Bandung : Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- Perwita, Anak Agung Banyu, 2007. *Manajemen Perbatasan Negara : Keamanan Nasional dalam Beni Sukadis (ed.) Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007*, Jakarta : DCAF - LESPERSI
- Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara (Buku Utama)*, 2007. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta
- Sapriya, (2007). *Perspektif Pemikiran Pakar Tentang Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa (Desertasi)*, Bandung : UPI (unpublished)
- Siahaan, Franses G, 2006. *Implementasi Tugas TNI untuk Mengamankan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan dan Kedaulatan NKRI (Kertas Karya Perorangan - Kursus Reguler ke XXXIII)*, Bandung : Sekolah Staf dan Komando TNI
- Wila, Marnixon R.C, 2006. *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Penelolan Wilayah Perbatasan Antar Negara : Kasus Wilayah Enklave Negara Timor Leste di Dalam Wilayah Negara Indonesia (Disertasi)*, Bandung : Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran